



BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

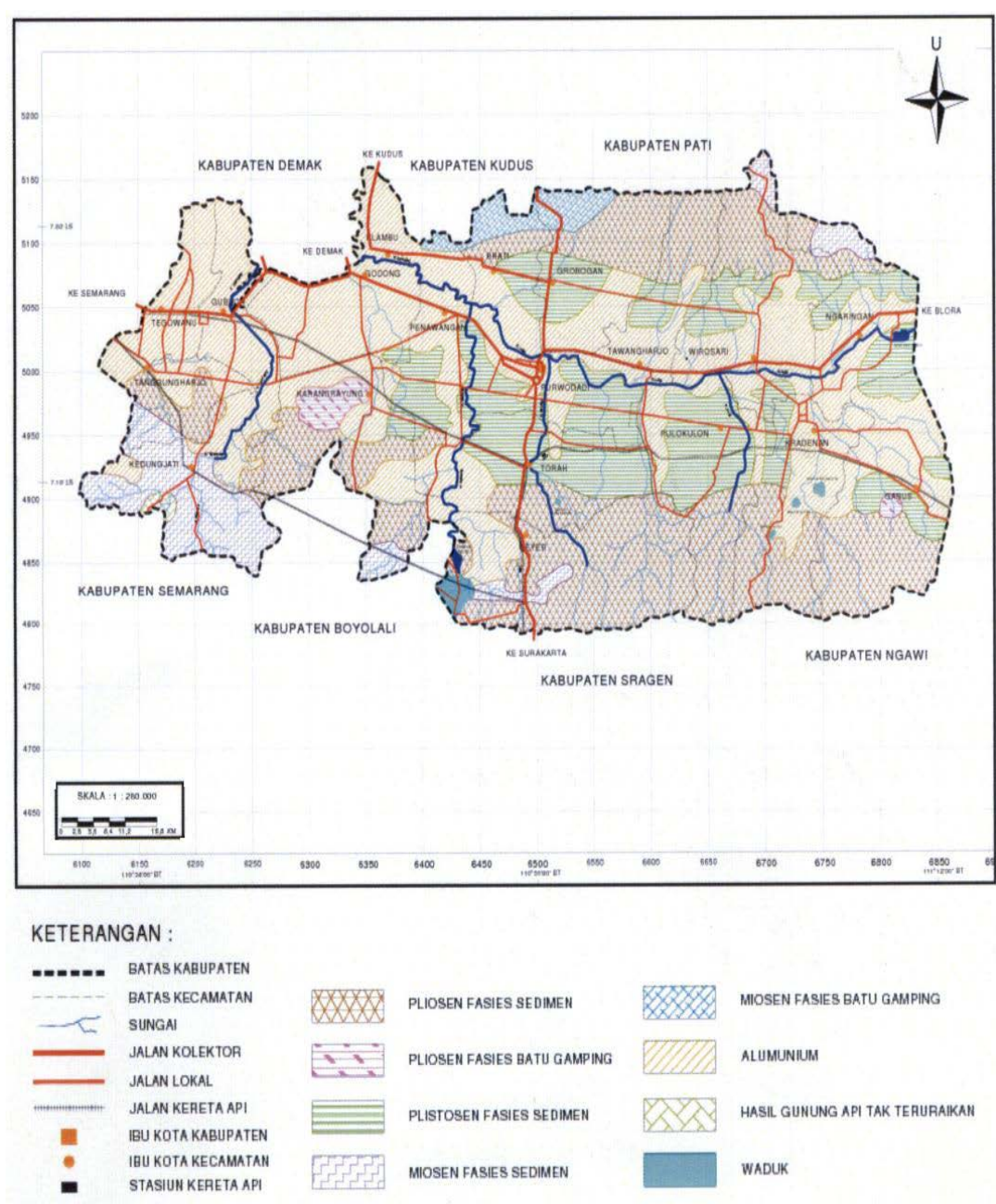
B. GAMBARAN KONDISI UMUM DAERAH

B. 1. Aspek Geografis

Kabupaten Grobogan merupakan salah satu kabupaten yang secara geografis berada di bagian timur dan berada di jalur tengah Provinsi Jawa Tengah, terletak diantara 110°15' BT – 111°25' BT dan 7° LS - 7°30'LS dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Kabupaten Semarang dan Demak.
- Sebelah Utara : Kabupaten Kudus, Pati dan Blora.
- Sebelah Timur : Kabupaten Blora.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Ngawi, Sragen, Boyolali, dan Semarang.

Dengan luas wilayah kurang lebih 1.975,86 Km², membentang dari arah barat ke timur sepanjang ± 83 km dan dari utara ke selatan ± 37 km. Kabupaten Grobogan yang beribukota di Purwodadi merupakan kabupaten terluas ke-2 di Provinsi Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap.



Gambar I. 1.
Peta Kabupaten Grobogan di Jawa Tengah

Sedangkan secara administrasi Kabupaten Grobogan terbagi/terdiri dari 19 kecamatan, 273 desa dan 7 kelurahan, sebagaimana tampak dalam Tabel I.1 berikut :



Tabel I.1
Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH DUSUN/LINGK	LUAS WILAYAH (KM ²)
1	Kedungjati	12	76	130,342
2	Karangrayung	19	100	140,595
3	Penawangan	20	71	74,177
4	Toroh	16	118	119,320
5	Geyer	13	102	196,192
6	Pulokulon	13	112	133,644
7	Kradenan	14	79	107,748
8	Gabus	14	87	165,365
9	Ngaringan	12	78	116,720
10	Wirosari	14	86	154,298
11	Tawangharjo	10	58	83,602
12	Grobogan	12	52	104,556
13	Purwodadi	17	104	77,656
14	Brati	9	51	54,891
15	Klambu	9	44	46,562
16	Godong	28	86	86,780
17	Gubug	21	62	71,119
18	Tegowanu	18	54	51,670
19	Tanggunharjo	9	31	60,628
Jumlah		280	1.451	1.975,86

Sumber : Bag.Tata Pemerintahan Setda Kab.Grobogan, 2016

Penggunaan lahan di Wilayah Kabupaten Grobogan seluas 197.586 Ha terdiri dari tanah sawah, bukan sawah dan lahan bukan pertanian dengan perincian sebagai berikut :

- a. Tanah sawah seluas 66.184 Ha terdiri dari:
 - 1) Irigasi : 29.881 Ha
 - 2) Tadah Hujan : 36.303 Ha
- b. Tanah bukan sawah seluas 44.129 Ha terdiri dari :
 - 1) Sementara tidak diusahakan : 0 Ha
 - 2) Tegalan/Kebun : 23.917 Ha
 - 3) Ladang/huma : 0 Ha



- 4) Perkebunan : 87 Ha
- 5) Hutan Rakyat : 4.160 Ha
- 6) Padang Rumput : 0 Ha
- 7) Lain-lain : 71.510 Ha
- c. Tanah Lahan bukan pertanian seluas 31.728 Ha

Kabupaten Grobogan dibagian utara dan selatan memiliki relief daerah pegunungan kapur dan perbukitan serta dataran di bagian tengahnya. Secara topografi kondisi tersebut dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Daerah dataran rendah sampai dengan 50 meter di atas permukaan laut rata-rata (*mean sea level*) dengan kemiringan antara 0 – 8°. Dataran ini, sebagian besar berada di Kecamatan Gubug, Tegowanu, Godong, Purwodadi, Grobogan bagian selatan dan Kecamatan Wirosari bagian selatan.
- b. Daerah perbukitan pada ketinggian antara 50-100 meter di atas permukaan air laut, dengan kemiringan antara 8-15° dengan topografi berombak hingga bergelombang, meliputi wilayah-wilayah kecamatan yang berada di sebelah utara, seperti Klambu, Brati, Grobogan sebelah utara, dan Wirosari sebelah utara.
- c. Daerah dataran tinggi pada ketinggian 100-500 meter diatas permukaan air laut, rata-rata dengan kemiringan tanah di atas 15°, meliputi wilayah kecamatan yang berada di sebelah selatan dari wilayah Kabupaten Grobogan.

Kabupaten Grobogan memiliki sumber bahan tambang dan galian yang cukup dapat diandalkan, meskipun sumbangan dari sektor pertambangan dan penggalian dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hingga saat ini masih relatif kecil. Hal tersebut disebabkan adanya beberapa kendala seperti cara penambangan, cara pengolahan hasil dan sumber daya manusianya. Kondisi seperti ini sangat memungkinkan terbukanya kesempatan bagi pihak swasta, baik dari dalam negeri maupun asing untuk menanamkan modalnya guna mengelola bahan tambang dan galian secara optimal.

Bahan tambang/galian yang dimiliki dan mungkin dapat dikembangkan di Kabupaten Grobogan meliputi : kapur, tanah liat, garam, gips, batu dan lain-lain.



B. 2. Aspek Demografi

Penduduk Kabupaten Grobogan pada akhir tahun 2016 berjumlah 1.444.202 jiwa. Dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2015 sebesar 1.431.535 jiwa, maka terdapat penambahan jumlah penduduk sebanyak 12.667 jiwa dengan demikian angka pertumbuhan penduduk sebesar 0,89%. Perkembangan penduduk Kabupaten Grobogan tahun 2015 sampai dengan 2016 dapat dilihat pada tabel I.2 berikut:

Tabel I. 2
Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2015-2016

No.	TAHUN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	PERTUMBUHAN (%)
		LAKI - LAKI	PEREMPUAN		
1	2015	718.225	713.310	1.431.535	1,36
2	2016	727.127	717.075	1.444.202	0,89

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil, 2017.

Jika dilihat dari segi sex ratio, jumlah penduduk di Kabupaten Grobogan lebih besar berjenis kelamin laki-laki daripada perempuan. Dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 727.127 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 717.075 jiwa, maka sex ratio penduduk mencapai 101%. Hal ini berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 101 jiwa penduduk laki-laki.

Sementara itu jika dilihat dari jumlah penduduk per wilayah, maka Kecamatan Purwodadi merupakan wilayah yang paling banyak penduduknya, yaitu mencapai 137.716 jiwa, sedangkan kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Klambu, yaitu sebanyak 37.935 jiwa. Untuk mengetahui rincian jumlah penduduk dan sex ratio per kecamatan, dapat dilihat pada tabel I.3 berikut :

Tabel I.3
Jumlah Penduduk per Kecamatan dan Sex Ratio Tahun 2016

No.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK			RASIO JENIS KELAMIN
		L	P	TOTAL	
1	KEDUNGJATI	22.471	22.332	44.803	101
2	KARANGRAYUNG	48.918	47.987	96.905	102



3	PENAWANGAN	32.047	32.015	64.062	100
4	TOROH	57.171	57.126	114.297	100
5	GEYER	33.238	33.097	66.335	100
6	PULOKULON	54.302	52.682	106.714	103
7	KRADENAN	41.525	40.897	82.422	102
8	GABUS	37.564	36.991	74.555	102
9	NGARINGAN	35.047	33.859	68.906	104
10	WIROSARI	47.177	46.372	93.549	102
11	TAWANGHARJO	29.493	28.527	58.020	103
12	GROBOGAN	39.173	38.194	77.367	103
13	PURWODADI	68.939	68.777	137.716	100
14	BRATI	25.178	24.434	49.612	103
15	KLAMBU	19.230	18.705	37.935	103
16	GODONG	43.575	43.712	87.287	100
17	GUBUG	42.686	42.138	84.824	101
18	TEGOWANU	28.344	27.978	56.322	101
19	TANGGUNGHARJO	21.319	21.252	42.571	100
	JUMLAH	727.127	717.075	1.444.202	101

Sumber : Data hasil penyesuaian sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/328/SJ perihal Pemanfaatan Data Kependudukan.

Angka kepadatan penduduk di Kabupaten Grobogan Tahun 2015 terlihat dalam Tabel I.4 dibawah ini :

Tabel I.4
Kepadatan Penduduk Tahun 2015

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (KM2)	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)	KEPADATAN (Jiwa/KM2)
1	Kedungjati	130,342	44.803	344
2	Karangrayung	140,595	96.905	689
3	Penawangan	74,177	64.062	864
4	Toroh	119,320	114.297	958
5	Geyer	196,192	66.335	338
6	Pulokulon	133,644	106.714	798



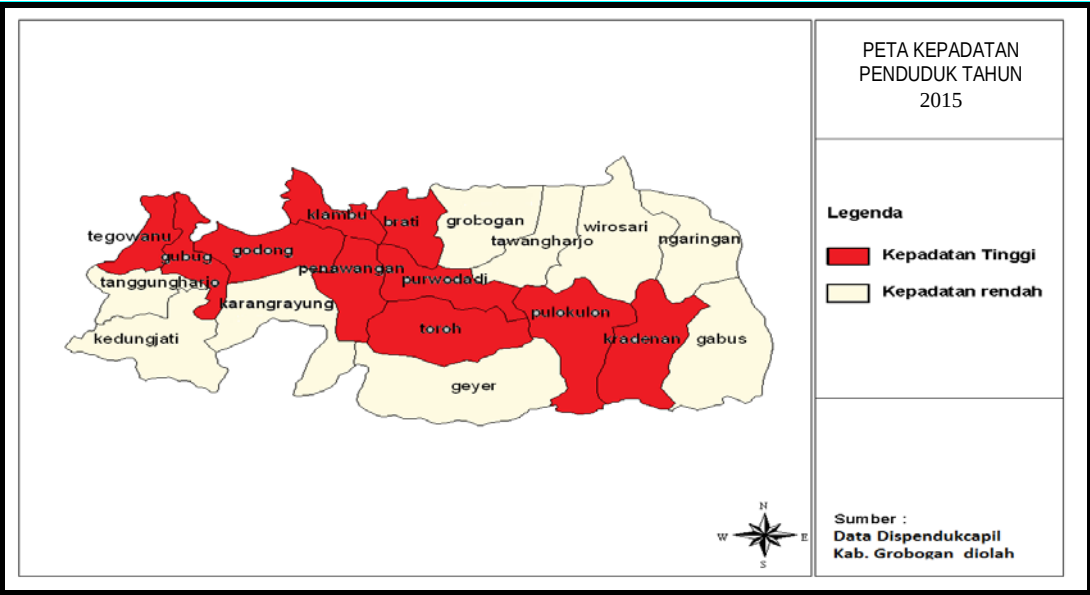
7	Kradenan	107,748	82.422	765
8	Gabus	165,365	74.555	451
9	Ngaringan	116,720	68.906	590
10	Wirosari	154,298	93.549	606
11	Tawangharjo	83,602	58.020	694
12	Grobogan	104,556	77.367	740
13	Purwodadi	77,656	137.716	1.773
14	Brati	54,891	49.612	904
15	Klambu	46,562	37.935	815
16	Godong	86,780	87.287	1.006
17	Gubug	71,119	84.824	1.193
18	Tegowanu	51,670	56.322	1.090
19	Tanggungharjo	60,628	42.571	702
JUMLAH		1.975,865	1.444.202	731

Sumber : Data hasil penyesuaian sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/328/SJ perihal Pemanfaatan Data Kependudukan.

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa Kecamatan Purwodadi memiliki tingkat kepadatan tertinggi sebesar 1.773 Jiwa/Km2. Hal ini wajar karena Purwodadi merupakan Ibukota Kabupaten Grobogan. Sementara kecamatan yang masuk dalam kategori kepadatan tinggi karena memiliki tingkat kepadatan lebih tinggi dari kepadatan Kabupaten adalah Kecamatan Pulokulon, Penawangan, Toroh, Kradenan, Klambu, Godong, Gubug, Brati, Grobogan dan Tegowanu. Sedangkan Kecamatan yang mempunyai angka kepadatan rendah, karena memiliki tingkat kepadatan lebih rendah dibanding kepadatan Kabupaten adalah kecamatan Geyer, Kedungjati, Karangrayung, Ngaringan, Gabus, Wirosari, Tawangharjo, dan Tanggungharjo.



Berikut peta kepadatan penduduk Kabupaten Grobogan, sebagaimana gambar I.2 sebagai berikut :



Gambar I.2
Peta Kepadatan Penduduk Tahun 2016

Berdasarkan struktur usia, penduduk Kabupaten Grobogan dapat di kelompokkan seperti dalam tabel sebagai berikut:

Tabel I. 5
Struktur Usia Penduduk Kabupaten Grobogan
Tahun 2016

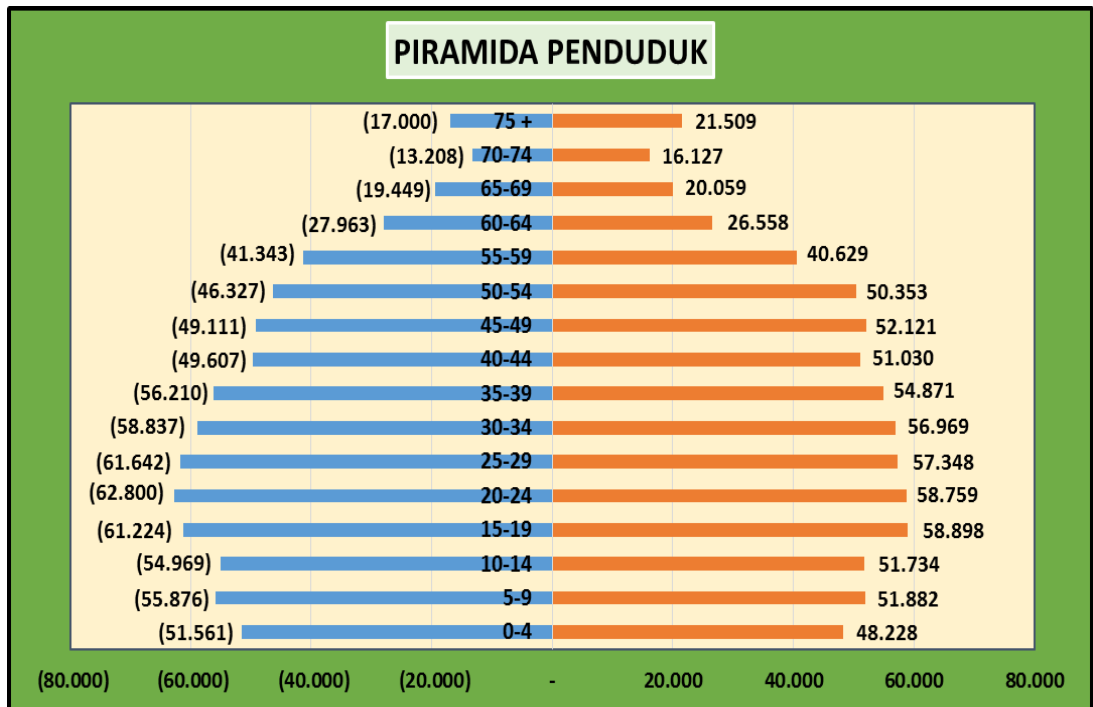
No.	KELOMPOK UMUR	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH
		L	P	
1	0-4	51.561	48.228	99.789
2	5-9	55.876	51.882	107.758
3	10-14	54.969	51.734	106.703
4	15-19	61.224	58.898	120.122
5	20-24	62.800	58.759	121.559
6	25-29	61.642	57.348	118.990
7	30-34	58.837	56.969	115.806
8	35-39	56.210	54.871	111.081
9	40-44	49.607	51.030	100.637
10	45-49	49.111	52.121	101.232
11	50-54	46.327	50.353	96.680
12	55-59	41.343	40.629	81.972



No.	KELOMPOK UMUR	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH
		L	P	
13	60-64	27.963	26.558	54.521
14	65-69	19.449	20.059	39.508
15	70-74	13.208	16.127	29.335
16	75 +	17.000	21.509	38.509
	TOTAL	727.127	717.075	1.444.202

Sumber : Data hasil penyesuaian sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/328/SJ perihal Pemanfaatan Data Kependudukan.

Dari data diatas dapat disusun dalam bentuk grafik komposisi penduduk Kabupaten Grobogan menurut kelompok umur dan jenis kelamin sebagaimana tampak dalam Gambar I.5 sebagai berikut :



Gambar. I.3
Grafik Penduduk menurut kelompok Umur Tahun 2016

Dari piramida penduduk diatas dapat diketahui angka ketergantungan penduduknya. Rasio Ketergantungan (Defendency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas (disebut bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).

Pada tahun 2016 sebagian besar penduduk Kabupaten Grobogan adalah kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun), yang



mencapai 1.022.600 jiwa, kemudian kelompok usia non produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun keatas) mencapai 421.602 jiwa, sehingga Angka rasio ketergantungan adalah 41%, artinya setiap 100 orang berusia produktif di Kabupaten Grobogan menanggung 41 orang yang non produktif.

Sementara untuk angka pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka dari tahun 2012 sampai akhir tahun 2015, mengalami tren penurunan, sedangkan untuk tahun 2016 data belum tersedia, selengkapnya dilihat dalam tabel I.6 sebagai berikut:

Tabel I.6
Angka Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka
di Kabupaten Grobogan Tahun 2012-2016

NO	TAHUN	JUMLAH ANGKATAN KERJA	JUMLAH PENYERAPAN	YANG BELUM TERSERAP	PREDIKSI PENGANGGURAN (%)
1	2012	778,813	745,068	33,745	4.33
2	2013	755,761	710,014	45,747	6.05
3	2014	751,484	719,573	31,911	4.25
4	2015	723.069	685.333	37.736	5,22%
5	2016	-	-	-	-

Sumber : BPS Kab. Grobogan, 2017

Kondisi pendidikan penduduk dapat dilihat dalam tabel jumlah penduduk menurut pendidikan tahun 2016, sebagai berikut :

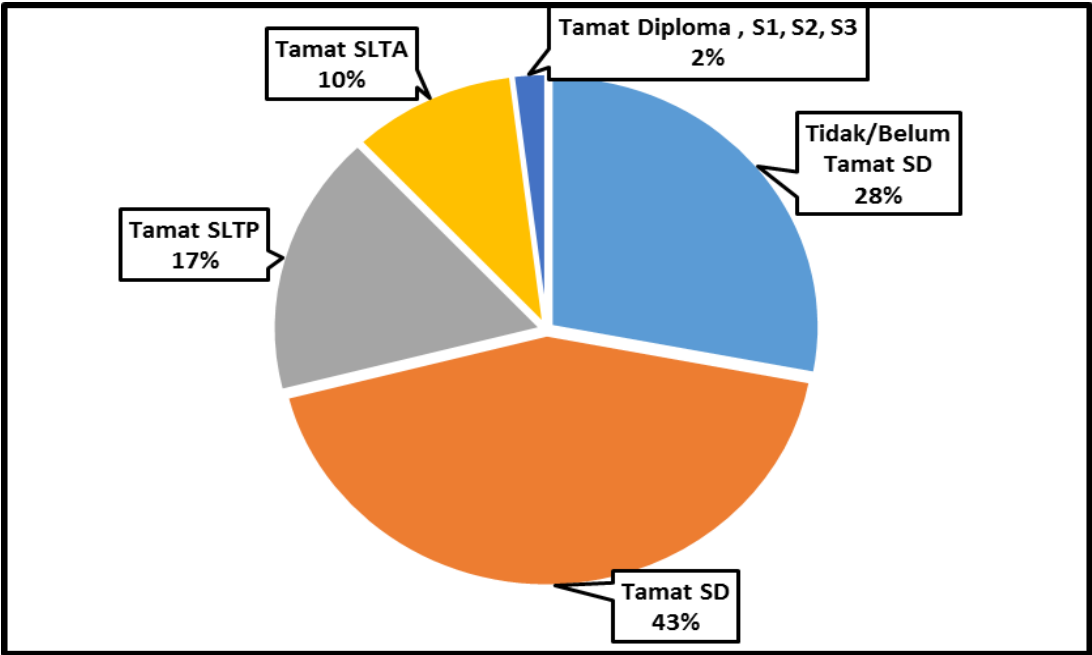
Tabel I.7
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2016

No.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Tidak/Belum Tamat SD	408.034
2	Tamat SD	621.767
3	Tamat SLTP	242.366
4	Tamat SLTA	139.465
5	Tamat Diploma , S1, S2, S3	32.570
	TOTAL	1.444.202

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan.



Dari data di atas, komposisi tingkat pendidikan penduduk, tertinggi ditempati kategori tamatan SD atau sederajat sebanyak 43,8%, kemudian secara berurutan diikuti tidak atau belum tamat SD sebanyak 28,4%, tamatan SLTP atau sederajat 16,3%, tamatan SLTA atau sederajat 9,3%, dan terakhir tamatan Diploma, S1, S2, dan S3 sebanyak 2,2%. Lebih jelas dapat dilihat dalam gambar komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditunjukkan dalam gambar I.4 berikut:



Gambar I.4
Komposisi Tingkat Pendidikan Penduduk Tahun 2016

Untuk mengetahui kinerja bidang pendidikan dapat dilihat melalui Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), sebagaimana dapat dilihat pada Tabel I.8 berikut:

Tabel I.8
APM dan APK Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Indikatif				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	APK SD	103,08	115,41	112,06	106,65	107,79
2.	APM SD	95,09	95,15	96,56	97,69	98,79
3.	APK SLTP	98,55	99,46	107,09	100,03	102,27
4.	APM SLTP	90,59	80,74	84,05	87,06	74,56
5.	APK SLTA	47,32	56,70	63,79	67,35	68,28
6.	APM SLTA	33,87	33,93	41,02	51,72	52,59

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Grobogan
Usia sekolah SD : 7-12 tahun, SLTP :13-15 tahun, SLTA :16-18 tahun.



Dari tabel I.9 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2016, nilai APM SD sebesar 98,79. Ini mengandung makna bahwa sebanyak 98,79 persen anak umur 7 sampai 12 tahun di Kabupaten Grobogan sedang memperoleh pendidikan di tingkat SD. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya kondisi ini menunjukkan perbaikan.
2. Nilai APM SLTP sebesar 74,56, artinya sebanyak 74,56 persen anak usia 13-15 tahun sedang mengenyam pendidikan SLTP.
3. Nilai APM SLTA sebesar 52,59 artinya sebanyak 52,59 persen anak 16-18 tahun sedang melangsungkan pendidikan di tingkat SLTA.

Selanjutnya kondisi prasarana pendidikan gedung sekolah, dapat dilihat dalam tabel I.9 sebagai berikut :

Tabel I.9
Kondisi Prasarana Gedung Sekolah tahun 2011-2015

NO	TAHUN	SD			SLTP			SLTA		
		RB	RR	B	RB	RR	B	RB	RR	B
1	2012	1.765	1.354	1.711	47	110	366	21	76	640
2	2013	1.466	1.276	2.546	109	261	1.557	20	132	712
3	2014	683	2.931	1.269	200	958	446	41	150	740
4	2015	291	2.790	1.205	156	915	362	17	629	396
5	2016	943	2.959	1.173	148	1048	322	48	634	366

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, 2017

RB: Rusak Berat, RR : Rusak Ringan, B : Bagus

B. 3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan masalah sosial ekonomi yang tidak hanya dialami oleh negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju. Di Kabupaten Grobogan berdasarkan data menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin selama empat tahun terakhir selalu mengalami penurunan, mulai dari 17,36% pada tahun 2011 dan berurutan mengalami penurunan 16,13%, 14,87%,



dan pada akhir tahun 2014 13,86. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel I.11 sebagai berikut :

Tabel I.10
Perkembangan Penduduk Miskin Tahun 2011-2015

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Penduduk Miskin %	17,38	16,13	14,87	13,86	13,68

Sumber : BPS Kab. Grobogan. (data tahun 2016 belum tersedia)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Berdasarkan data Tahun 2015, Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 sebesar 2,37 atau berada di atas rata-rata angka nasional sebesar 1,90. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Ukuran ini memberikan informasi saling melengkapi pada kasus kemiskinan. Capaian Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2013 sebesar 0,59 atau lebih tinggi dari rata-rata angka nasional sebesar 0,49.

Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengurangan kesenjangan pengeluaran penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah dalam empat tahun terakhir cukup efektif. Perbandingan perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan antara Kabupaten Grobogan dengan kabupaten-kabupaten tetangga dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel I.11 sebagai berikut :

Tabel I.11
Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dengan Kabupaten Tetangga dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015

Kode	Kabupaten /Kota	2015				
		Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin	P1	P2	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/bulan)
09 3309	Kab. Boyolali	119,970	12,45	2,01	0,50	263.734
14 3314	Kab. Sragen	130,420	14,86	2,69	0,76	263.199



Kode	Kabupaten /Kota	2015				
		Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin	P1	P2	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/bulan)
15 331 5	Kab. Grobogan	184,490	13,68	2,56	0,65	303.455
16 331 6	Kab. Blora	115,050	13,52	2,08	0,54	257.581
18 331 8	Kab. Pati	147,050	11,95	2,02	0,55	347.575
19 331 9	Kab. Kudus	64,100	7,73	0,90	0,17	328.404
21 332 1	Kab. Demak	160,890	14,44	2,32	0,60	328.529
22 332 2	Kab. Semarang	81,250	8,15	1,33	0,30	286.918
	JAWA TENGAH	4.561,83	13,58	2,09	0,51	281.570

Ketr : P1 = Indeks Kedalaman Kemiskinan
P2 = Indeks Keparahan Kemiskinan

Sumber : BPS Kab. Grobogan, 2017(diolah)

b. Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup (e0), indeks pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Grobogan mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel I.12
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2011 – 2015

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Nilai IPM Kabupaten	65,41	66,39	67,43	67,77	68,05
Nilai IPM Provinsi	66,64	67,21	68,02	68,78	69,49
Peringkat Kabupaten Dalam Provinsi	20	19	19	19	21

Sumber : BPS Kab. Grobogan.(data tahun 2016 belum tersedia)

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai IPM Kabupaten Grobogan pada tahun 2015 adalah sebesar 68,05. Angka ini termasuk dalam kelas pembangunan manusia kategori SEDANG. Apabila dibandingkan dengan nilai IPM pada tahun-tahun sebelumnya, IPM di Kabupaten Grobogan mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan keberhasilan program-program Pemerintah



Kabupaten Grobogan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

c. Prasarana Ibadah dan Sosial Keagamaan

Upaya meningkatkan mutu pelayanan kehidupan beragama telah dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana keagamaan berupa rumah ibadah. Berikut ini data prasarana ibadah dan sosial keagamaan di Kabupaten Grobogan pada tahun 2011 sampai tahun 2015, sebagaimana Tabel I.14 berikut:

Tabel I.13
Prasarana Ibadah dan Sosial Keagamaan Tahun 2011-2015

No	Jenis Tempat Ibadah dan Sosial	Jumlah				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Masjid	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345
2	Mushola	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712
3	Langgar/Surau	4.608	4.608	4.608	4.608	4.608
4	Gereja	114	111	111	111	111
5	Pura/Kuil/Vihara	19	18	18	18	18
6	P. Sosial Asuhan Anak	28	28	28	28	28
7	P. Sosial Tresna Werda	1	1	1	1	1
8	Panti Orang Gila	1	1	1	1	1
9	Panti Persinggahan	1	1	1	1	1
10	Panti Cacat	1	1	1	1	1

Sumber data : Bagian Kesra Setda Kab. Grobogan

d. Kesehatan

Perkembangan pembangunan kesehatan di Kabupaten Grobogan dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan menyeluruh yang dekat dengan masyarakat. Kondisi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan tahun 2016 secara rinci seperti pada tabel 1.15 berikut :

Tabel I.14
Kondisi Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Tahun 2016

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
1.	Rumah Sakit	7	7	-	-
2.	Puskesmas	30	25	4	1



No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
2.	Puskesmas Pembantu	69	28	26	15
3.	Klinik	38	38	-	-

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Grobogan.

Adapun indikator keberhasilan pembangunan kesehatan dapat diukur dengan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Balita (AKABA), dan Prevalensi Gizi Buruk Balita. Perkembangan AKB, AKI, AKBA, dan prevalensi gizi buruk pada balita tahun 2012 sampai tahun 2016 seperti pada tabel 1.16 berikut :

Tabel I.15
Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Prevalensi Gizi Buruk Kabupaten Grobogan Tahun 2012 – 2016

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Indikatif				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	AKB/1000 KH	10,60	14,14	17,82	17,44	17,22
2.	AKI/100.000 KH	150,12	101,10	188,69	149,92	127,19
3.	AKABA/1000 KH	11,61	15,72	19,53	18,99	20,17
4.	PREVALENSI GIZI BURUK BALITA	0,03	0,05	0,06	0,05	0,03

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Grobogan.

Angka kematian bayi (AKB) merupakan banyaknya kematian bayi umur kurang dari 1 tahun (0–11 bulan) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. Angka kematian bayi menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat.

Berdasarkan tabel I.16, AKB di Kabupaten Grobogan tahun 2016 sebesar 17,22/1.000 kelahiran hidup (KH) dan bila dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 17,44/1.000 KH, AKB mengalami penurunan. Secara nasional sesuai target sasaran strategis dalam pembangunan kesehatan Kementerian Kesehatan yaitu 24 per 1.000 KH, AKB di Kabupaten Grobogan masih di bawah angka tersebut. Walaupun telah menunjukkan penurunan, namun



bila dibandingkan dengan Indikator Rencana Aksi Daerah *Millenium Development Goals* (RAD MDGs) Provinsi Jawa Tengah yang ditargetkan sebesar 9,1/1.000 KH, Kabupaten Grobogan belum dapat mencapai target tersebut.

Angka kematian ibu (AKI) dihitung semasa kehamilan, persalinan dan masa nifas yang mempunyai manfaat sebagai gambaran risiko dihadapi oleh ibu selama kehamilan dan melahirkan. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetrik. Kematian ibu adalah kasus kematian perempuan yang diakibatkan oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan (termasuk hamil ektopik), persalinan, abortus (termasuk abortus mola) dan masa dalam kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi. Angka kematian ibu di Kabupaten Grobogan tahun 2016 sebesar 127,19/100.000 kelahiran hidup (KH) dan bila dibandingkan tahun 2015 sebesar 149,92/100.000 KH, angka tersebut juga menunjukkan penurunan. Namun apabila dibandingkan dengan target MDGs sebesar 102 per 100.000 dan target Provinsi Jawa Tengah sebesar 60/100.000 KH, Kabupaten Grobogan belum dapat mencapai target tersebut.

Angka Kematian Anak Balita (AKABA) adalah kematian anak balita (12 – 59 bulan) per 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian balita mempunyai manfaat untuk mengetahui gambaran tingkat permasalahan kesehatan anak balita, tingkat pelayanan KIA, tingkat keberhasilan program KIA dan menilai kondisi sanitasi lingkungan. Angka kematian balita di Kabupaten Grobogan tahun 2016 sebesar 20,17/1.000 KH, lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 18,99/1.000 KH. Selanjutnya bila dibandingkan dengan target MDGs yaitu 32 per 1.000 kelahiran hidup, AKABA di Kabupaten Grobogan masih sesuai target, namun bila dibandingkan RAD MDGs Provinsi Jawa Tengah sebesar 12,01/1.000 KH, RAD MDGs Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan belum dapat mencapai target tersebut.

Permasalahan AKI, AKB dan AKABA di Kabupaten Grobogan memerlukan usaha keras dan dukungan semua pihak untuk menurunkannya. Upaya yang sudah dilaksanakan antara lain :



- 1). Kebijakan persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) sebagai upaya menjamin persalinan dikelola oleh tenaga kesehatan yang terampil dan kompeten dengan ditunjang sarana prasarana yang memadai termasuk kesiapan sistem rujukan. Kebijakan yang cukup tegas ini memberikan inspirasi kepada Kementerian Kesehatan RI, sehingga Dinas Kesehatan kabupaten Grobogan telah 2 (dua) kali didaulat menjadi nara sumber pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan.
- 2). Pemantauan kinerja klinis untuk pelayanan ibu dan bayi baru lahir pada 10 (sepuluh) Puskesmas dengan dukungan Program *Expanding Maternal and Neonatal Survival* (EMAS) untuk memotivasi agar peralatan dan pelayanan yang diberikan sesuai standar.
- 3). *Short Massage Service* (SMS) bunda yaitu layanan sms ke nomor 08118469468 yang secara berkala memberikan pesan kepada ibu dan keluarganya tentang kehamilan dan pasca persalinan serta bayi dan anak umur usia 2 tahun. Sejak diluncurkan pada Bulan Agustus 2015, Kabupaten Grobogan mempunyai cakupan tertinggi se- Indonesia.
- 4). Menambah bidan baru untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kebidanan khususnya pada desa yang sulit akses pelayanan kesehatannya.
- 5). Meningkatkan ketrampilan teknis kebidanan dan bayi baru lahir bagi dokter pada 30 Puskesmas dan dokter fasilitas pelayanan kebidanan swasta dengan mendapat dukungan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kabupaten Grobogan.
- 6). Meningkatkan ketrampilan bidan dalam pelayanan kebidanan dan neonatus yang didukung oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kabupaten Grobogan dan IDI.
- 7). Bimbingan teknis fokus pada peningkatan cakupan pelayanan kehamilan, persalinan dengan partograf dan ibu nifas termasuk bayi baru lahir dengan Manajemen Terpadu bayi Muda (MTBM) pada 30 Puskesmas.
- 8). Penyediaan peralatan pelayanan kehamilan, persalinan, dan nifas serta bayi baru lahir secara mandiri oleh Puskesmas dengan menggunakan dana JKN (Jaminan Kesehatan nasional) pada 30 Puskesmas. Disamping itu juga mendapat dukungan



dari Kementerian Kesehatan melalui bantuan paket bidan kit sebanyak 146 paket.

- 9). Rehab pembangunan ruang bersalin di Puskesmas menggunakan dana APBD Kabupaten Grobogan pada 5 (lima) Puskesmas.

Upaya-upaya yang dilaksanakan dan telah menunjukkan hasilnya ini akan terus ditingkatkan pada tahun 2017 yang akan datang. Disamping upaya-upaya yang telah berjalan tersebut, upaya baru yang akan dikembangkan diantaranya :

- 1). Rehab pembangunan ruang bersalin di Puskesmas menggunakan dana APBD Kabupaten Grobogan sebanyak 12 (dua belas) Puskesmas.
- 2). Peningkatan kapasitas Puskesmas dalam pelayanan kebidanan, persalinan dan pelayanan bayi baru lahir dengan membangun Puskesmas PONED (Pelayanan Obstetrik Neonatus Emergensi Dasar sebanyak 5 (lima) Puskesmas dengan dukungan dana APBN.
- 3). Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) untuk mempersiapkan ibu dua hari sebelum melahirkan dan tiga hari perawatan setelah melahirkan bagi 6.320 ibu hamil, rujukan bagi 5.820 ibu hamil risiko tinggi dan 500 ibu hamil di desa terpencil.
- 4). Pengembangan jejaring dengan *Centre of Indonesia's Strategic Initiative* (CISID) yaitu suatu lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan memberikan pendampingan pada tiga Puskesmas selama tiga tahun.

Selanjutnya pendataan gizi kurang dan gizi buruk didasarkan pada 2 kategori, kategori pertama membandingkan berat badan dengan umurnya (BB/U) dan kategori kedua membandingkan berat badan dengan tinggi badannya (BB/TB).

Skrining pertama dilakukan di Posyandu dengan kategori pertama yaitu membandingkan berat badan dengan umurnya melalui kegiatan penimbangan. Jika ditemukan kasus gizi kurang/buruk dilakukan perawatan gizi kurang/buruk sesuai pedoman di Posyandu dan Puskesmas, dilanjutkan dengan skrining berikutnya yaitu dengan membandingkan berat badan dengan tinggi badannya, jika ternyata menderita gizi buruk maka dilakukan perawatan sesuai standar sampai di Rumah Sakit.



Prevalensi Balita dengan Gizi Buruk di Kabupaten Grobogan selama kurun waktu tiga tahun terakhir terjadi kenaikan. Prevalensi Balita dengan Gizi Buruk di Kabupaten Grobogan pada tahun 2016 sebesar 0,03%, bila dibandingkan dengan RAD MDGs sebesar < 5% masih sesuai target.

B. 4. Kondisi Ekonomi Daerah

a. Potensi Daerah

Produk unggulan adalah produk yang mempunyai keunggulan dari segi produksi, kontinuitas dan daya saing sehingga diterima oleh masyarakat dan menarik investor. Sesuai kondisi geografis/potensi wilayah yang ada, produk unggulan di Kabupaten Grobogan adalah : padi, jagung, kedelai, dan batu kapur, mebel serta genteng press.

Selain produk unggulan Kabupaten Grobogan juga memiliki produk andalan yaitu produk yang dapat diandalkan oleh suatu daerah karena banyak diusahakan oleh masyarakat setempat dan mempunyai prospek pasar yang cerah, diantaranya adalah : sapi bibit, sale pisang, melon merah, kecap, paha katak, sarang burung walet dan kerajinan alat pertanian.

b. Pertumbuhan PDRB

Secara makro, Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari besarnya persentase pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Adapun PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto/nilai output akhir yang bersumber dari berbagai sektor lapangan usaha di suatu daerah tertentu tanpa memperhatikan pemilikan atas faktor produksi. Itu artinya perekonomian suatu daerah dapat dikatakan mengalami pertumbuhan apabila terdapat peningkatan nilai tambah dari hasil produksi barang dan jasa pada periode tertentu. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi daerah tercermin melalui pertumbuhan angka PDRB.

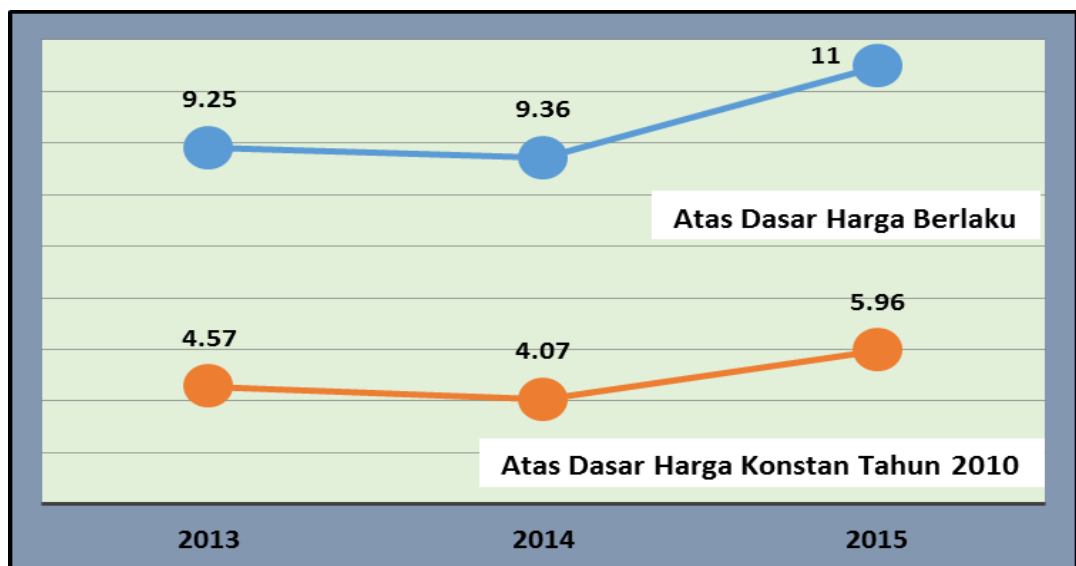
Berdasarkan pertumbuhan PDRB Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015 dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan Tahun 2015 mengalami pertumbuhan positif. Hal ini ditunjukkan dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 11,07 dan atas dasar harga konstan sebesar 4,24. Hal ini ditunjukkan dari angka pertumbuhan PDRB, dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sebagaimana terlihat dalam Tabel I.17 dan Gambar I.5 sebagai berikut :



Tabel I.16
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015

PDRB	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
Atas Dasar Harga Berlaku	8,78	9,58	9,23	9,29	11
Atas Dasar Harga Konstan	3,19	5,08	4,55	4,03	5,96

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan (data tahun 2016 belum tersedia)



Gambar. I.5
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Grobogan

c. Pertumbuhan Sektorial terhadap PDRB

Secara keseluruhan pertumbuhan sektoral PDRB pada tahun 2011 sampai dengan 2015 atas dasar harga konstan tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel I.18 sebagai berikut :



Tabel I.17
Pertumbuhan Sektoral PDRB Tahun 2011-2015
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010

No	Kelompok Lapangan Usaha	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-2,64	4,53	1,78	0,10	7,07
2	Pertambangan dan Penggalan	7,61	14,04	8,00	5,27	2,31
3	Industri Pengolahan	7,82	6,65	7,79	7,74	6,40
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,12	9,37	8,90	0,96	3,36
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,66	-1,24	2,21	4,65	1,81
6	Konstruksi	3,22	6,44	6,59	5,07	5,58
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,44	3,92	4,48	4,05	4,06
8	Transportasi dan Pergudangan	7,63	7,26	7,49	7,69	6,30
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,12	2,90	1,89	6,44	6,50
10	Informasi dan Komunikasi	7,32	7,83	7,75	10,19	8,83
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,69	4,72	6,39	7,32	7,30
12	Real Estate	6,85	6,31	9,13	5,80	6,15
13	Jasa Perusahaan	4,48	5,24	5,70	5,86	8,21
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,02	0,65	2,96	1,11	4,98
15	Jasa Pendidikan	13,26	12,31	7,47	6,79	6,74
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,43	5,22	3,68	5,48	6,27
17	Jasa lainnya	4,23	1,76	7,49	8,08	3,16
	PDRB	3,19	5,08	4,55	4,03	5,96

Sumber :BPS Kab.Grobogan (data tahun 2016 belum tersedia).

d. Perkembangan PDRB

Secara sektoral, perkembangan PDRB Atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku dari tahun 2012 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada Tabel I.19 dan I.20 sebagai berikut :



Tabel I.18
Perkembangan Sektoral PDRB Tahun 2012-2015
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010

No	Kelompok Lapangan Usaha	TAHUN (Rp dalam jutaan)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.420.863,13	4.499.335,70	4.503.752,85	4.821.978,84	
2	Pertambangan dan Penggalian	154.980,80	167.384,78	176.199,50	180.264,97	
3	Industri Pengolahan	1.431.366,15	1.542.864,73	1.662.217,60	1.768.851,74	
4	Pengadaan Listrik dan Gas	13.603,07	14.813,60	14.956,19	15.871,55	
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.880,77	7.032,63	7.359,51	7.492,64	
6	Konstruksi	755.160,38	804.908,83	845.723,83	892.916,03	
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.006.953,63	3.141.785,87	3.269.107,53	3.401.377,48	
8	Transportasi dan Pergudangan	660.218,03	709.686,48	764.286,68	812.458,16	
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	615.007,85	626.623,07	666.959,99	710.334,81	
10	Informasi dan Komunikasi	348.212,54	375.216,21	413.465,48	449.960,76	
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	504.465,72	536.722,88	576.002,05	618.023,50	
12	Real Estate	309.365,92	337.597,87	357.185,23	379.163,16	
13	Jasa Perusahaan	32.352,13	34.194,86	36.198,37	39.741,21	
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan	507.617,38	522.630,87	528.432,22	554.725,40	



No	Kelompok Lapangan Usaha	TAHUN (Rp dalam jutaan)				
		2012	2013	2014	2015	2016
	dan Jaminan Sosial Wajib					
15	Jasa Pendidikan	572.649,79	615.423,66	657.206,72	712.160,40	
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	130.235,87	135.033,46	142.437,11	151.367,30	
17	Jasa lainnya	372.113,97	399.973,44	432.271,50	445.931,47	
	PDRB	13.842.047,14	14.471.228,93	15.053.762,36	15.962.619,43	

Sumber : BPS Kab.Grobogan (data tahun 2016 belum tersedia).

Tabel I.19
Perkembangan Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2012-2016

No	Kelompok Lapangan Usaha	TAHUN (Rp dalam jutaan)				
		2012	2013	2014	2015	2016*
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.000.614,76	5.446.273,45	5.751.016,30	6.536.563,53	
2	Pertambangan dan Penggalian	165.662,69	184.416,99	220.353,99	255.566,80	
3	Industri Pengolahan	1.619.849,27	1.785.792,88	2.062.929,38	2.328.569,80	
4	Pengadaan Listrik dan Gas	13.497,74	14.004,57	14.218,96	16.257,77	
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.541,91	8.481,08	9.410,32	9.384,61	
6	Konstruksi	825.363,16	911.045,21	1.031.137,08	1.141.582,07	
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.167.011,34	3.408.388,66	3.643.079,36	3.917.535,22	
8	Transportasi dan Pergudangan	664.486,63	722.417,16	828.064,18	912.088,39	
9	Penyediaan Akomodasi	658.282,50	706.464,56	794.495,97	889.231,96	



No	Kelompok Lapangan Usaha	TAHUN (Rp dalam jutaan)				
		2012	2013	2014	2015	2016*
	dan Makan Minum					
10	Informasi dan Komunikasi	344.948,00	363.504,00	390.624,57	417.433,51	
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	581.561,40	647.811,84	731.061,52	819.200,12	
12	Real Estate	316.746,47	350.127,31	386.123,88	426.519,37	
13	Jasa Perusahaan	35.613,71	39.465,91	43.233,89	49.872,70	
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	570.981,16	615.639,31	661.956,08	722.062,74	
15	Jasa Pendidikan	707.321,20	822.946,56	919.721,82	1.013.555,68	
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	150.961,79	164.640,77	181.371,78	199.562,01	
17	Jasa lainnya	386.986,58	430.067,33	496.047,15	527.102,92	
	PDRB	15.217.430,31	16.621.487,57	18.164.846,24	20.182.089,21	

Sumber :BPS Kab.Grobogan (data tahun 2016 belum tersedia).

e. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator makro ekonomi untuk melihat perkembangan perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Dengan melihat PDRB per kapita Kabupaten Grobogan, maka akan terlihat tingkat kesejahteraan masyarakatnya. PDRB perkapita masyarakat Kabupaten Grobogan, tahun 2015 mengalami kenaikan, baik dihitung atas dasar Harga Berlaku maupun Harga Konstan. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam Tabel I.21 sebagai berikut :

Tabel I. 20
PDRB Per Kapita Tahun 2012-2016

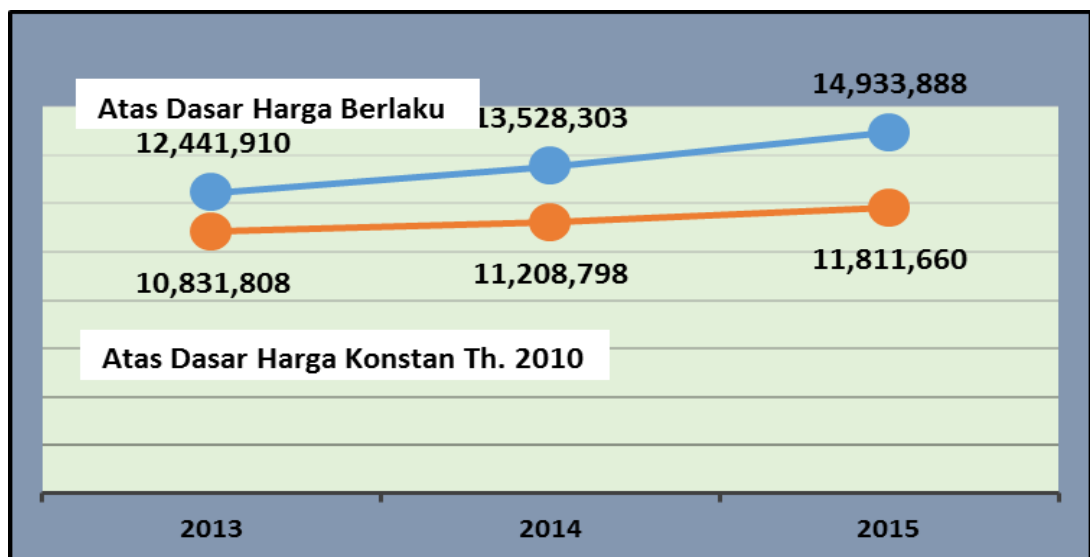
No	Tahun	Jumlah penduduk Hasil Proyeksi	PDRB (Juta Rp.)		PDRB Perkapita (Rp.)	
			harga berlaku	harga konstan 2010	harga berlaku	harga konstan 2010
1	2	3	4	5	6	7
1	2012	1.328.197	15.217.430,31	13.842.047,14	11.457.209	10.421.682
2	2013	1.336.304	16.621.487,57	14.471.228,93	12.438.403	10.829.294



No	Tahun	Jumlah penduduk Hasil Proyeksi	PDRB (Juta Rp.)		PDRB Perkapita (Rp.)	
			harga berlaku	harga konstan 2010	harga berlaku	harga konstan 2010
1	2	3	4	5	6	7
3	2014	1.343.960	18.164.846,24	15.053.762,36	13.515.913	11.201.049
4	2015	1.351.429	20.182.089,21	15.962.619,43	14.933.888	11.811.660
5	2016*)	-	-	-	-	-

Sumber :BPS Kab .Grobogan (data tahun 2016 belum tersedia).

Sesuai tabel di atas terlihat data pertumbuhan PDRB perkapita Tahun 2015 atas dasar Harga Konstan sebesar Rp. 11.811.660,- atau naik 5,38% dari tahun sebelumnya. Sedangkan atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 14.933.888,- atau naik sebesar 10,39%. Pergerakan kenaikan pendapatan per kapita ini dapat dilihat pada gambar I.5 sebagai berikut :



Gambar I.6
Grafik Perkembangan Pendapatan Per Kapita Tahun 2011-2015

f. Inflasi

Tingkat inflasi di Kabupaten Grobogan pada tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami fluktuasi. Tingkat inflasi yang terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu 1,86 sedangkan tertinggi pada tahun 2014 sebesar 8,03. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah, sebagai berikut :



Tabel I.21
Angka Inflasi Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Inflasi	4,48	7,88	8,03	3,31	2,41

Sumber :BPS Kab. Grobogan, 2017.

Tabel I.22
**Perbandingan Angka Inflasi Kabupaten Grobogan dengan
Kabupaten Sekitarnya dan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2011-2015**

Kode	KABUPATEN	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
3315	Grobogan	4.48	7.88	8.03	3,31	2,41
3309	Boyolali	3.45	8.21	7.45	2,58	2,65
3314	Sragen	3.74	7.55	7.11		2,49
3316	Blora	3.55	7.94	7.13	2,85	2,12
3318	Pati	3.92	7.57	8.01	3,23	2,31
3319	Kudus	4.77	8.31	8.59	3,28	2,32
3321	Demak	4.10	8.22	8.69	2,81	2,27
3322	Semarang	4.56	8.11	8.63	2,85	2,32
3300	Prov. Jawa Tengah	4.24	7.99	8.22	2,73	2,26

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan, 2017

g. Pemerataan Pendapatan

Pemerataan pendapatan masyarakat dapat dilihat dari indikator nilai Indeks Gini Ratio dan Proporsi Pendapatan yang dinikmati oleh kelompok 40% penduduk yang berpendapatan terendah (Kriteria Bank Dunia). Berdasarkan kriteria tersebut, maka kondisi pemerataan pendapatan masyarakat dapat dilihat sebagaimana tabel sebagai berikut :



Tabel I.23
Indikator Distribusi Pendapatan Masyarakat
Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	Keterangan
1.	Indeks Gini Ratio	0,32	0,35	0,34	0,34	0,29	Masuk dalam kategori ketimpangan rendah, karena di bawah batas ketimpangan (<0,35)
2.	Prosentase pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk yang berpendapatan rendah	21,8 4%	18,9 1%	21,3 8%	21,3 4%	22,64 %	Masuk dalam kategori ketimpangan rendah, karena di atas batas ketimpangan (>17%)

Sumber :BPS Kab. Grobogan (data tahun 2016 belum tersedia).

Berdasarkan data pada Tabel I.24, di atas dapat diketahui bahwa pemerataan pendapatan masyarakat Kabupaten Grobogan berada pada kategori ketimpangan rendah yang ditunjukkan dari indikator Angka Indeks Gini Ratio selama empat tahun berturut-turut selalu berada di bawah angka 0,35.

Berdasarkan kriteria Bank Dunia, 40% penduduk berpendapatan rendah selama empat tahun berturut-turut menerima lebih dari 17% dari pendapatan total kabupaten yakni mulai tahun 2013 sebesar 21,38%, tahun 2014 sebesar 21,34% serta tahun 2015 sebesar 22,64%.

B. 5. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan sejak dilaksanakan otonomi daerah Tahun 1999 telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir tentang penataan organisasi perangkat daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, dan guna menghindari tumpang tindih tugas pokok dan fungsi organisasi



maka pada Tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Grobogan telah menetapkan 5 (lima) Peraturan Daerah, sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Grobogan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Grobogan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Grobogan.

Selanjutnya pada Tahun 2012 ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan. Sehingga saat ini Struktur Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah, merupakan unsur staf sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah. Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) , merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Sekretariat DPRD secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah. Terdiri dari :



- 3.1. Dinas Pendidikan, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan pendidikan. Unsur pelaksana teknis pada Dinas Pendidikan sejumlah 19 (sembilan belas) UPTD yang berada di setiap kecamatan dan 1 (satu) UPTD Sanggar Kegiatan Belajar, untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang bidang pendidikan.
- 3.2. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kepemudaan, olah raga, kebudayaan dan pariwisata sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan kepemudaan, olah raga, kebudayaan dan pariwisata. Unsur pelaksana teknis pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sejumlah 7 (tujuh) UPTD yang berada di 6 (enam) wilayah eks Pembantu Bupati dan 1 (satu) UPTD Sarana dan Prasarana Olah Raga untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang bidang kepemudaan, olah raga, kebudayaan dan pariwisata.
- 3.3. Dinas Kesehatan, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan kesehatan. Unsur pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan terdiri dari 30 (tiga puluh) UPTD Puskesmas, 1 (satu) UPTD Gudang Farmasi, 1 (satu) UPTD Laboratorium Kesehatan dan 1 (satu) UPTD Pra Badan Pelayanan Kabupaten Grobogan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang bidang kesehatan.
- 3.4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Unsur pelaksana teknis pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari 1 (satu) UPTD Transito dan 1 (satu) UPTD Balai Latihan Kerja untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- 3.5. Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang perhubungan, informatika dan komunikasi sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan bidang



- perhubungan, komunikasi dan informatika. Unsur pelaksana teknis pada Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi terdiri dari 3 (tiga) UPTD Terminal dan 1 (satu) UPTD Perparkiran untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang bidang Perhubungan, Informasi dan Komunikasi.
- 3.6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan kependudukan dan catatan sipil. Unsur pelaksana teknis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari 19 (sembilan belas) UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berada di setiap kecamatan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- 3.7. Dinas Bina Marga, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pekerjaan umum bina marga sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan pekerjaan umum bina marga. Unsur pelaksana teknis pada Dinas Bina Marga terdiri dari 6 (enam) UPTD Bina Marga Wilayah, 1 (satu) UPTD Workshop, dan 1 (satu) UPTD Laboratorium Konstruksi untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang bidang pekerjaan umum bina marga.
- 3.8. Dinas Pengairan, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pekerjaan umum pengairan sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan pekerjaan umum pengairan. Unsur pelaksana teknis pada Dinas Pengairan terdiri dari 6 (enam) UPTD Pengairan di tiap wilayah eks Pembantu Bupati untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang bidang pengairan.
- 3.9. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang koperasi, usaha, kecil dan menengah sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan koperasi, usaha, kecil dan menengah.
- 3.10. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi sumberdaya mineral sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan perindustrian, perdagangan,



pertambangan dan energi sumberdaya mineral. Unsur pelaksana teknis pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi terdiri dari 7 (tujuh) UPTD Pasar Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang bidang Pasar Daerah.

- 3.11. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Unsur pelaksana teknis pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari 19 (sembilan belas) UPTD Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan, 1 (satu) UPTD Balai Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura dan 1 (satu) UPTD Laboratorium Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- 3.12. Dinas Peternakan dan Perikanan, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pertanian khusus peternakan dan perikanan sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan pertanian khusus peternakan dan perikanan. Unsur pelaksana teknis pada Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari 8 (delapan) UPTD Peternakan dan Perikanan, 1 (satu) UPTD Rumah Potong Hewan, dan 2 (dua) UPTD Balai Benih Ikan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang bidang pertanian khusus peternakan dan perikanan.
- 3.13. Dinas Kehutanan dan Perkebunan, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kehutanan dan bidang pertanian khusus perkebunan sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan kehutanan dan pertanian khusus perkebunan. Unsur pelaksana teknis pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari 6 (enam) UPTD Kehutanan dan Perkebunan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang bidang kehutanan dan bidang pertanian khusus perkebunan.
- 3.14. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pekerjaan umum bidang cipta karya, perumahan, penataan ruang dan bidang pekerjaan umum khusus



kebersihan, pertamanan dan pemakaman sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan pekerjaan umum khusus cipta karya, perumahan, penataan ruang dan bidang pekerjaan umum khusus kebersihan, pertamanan dan pemakaman. Unsur pelaksana teknis pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan terdiri dari 6 (enam) UPTD Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan, 1 (satu) UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah, 1 (satu) UPTD Work Shop, 1 (satu) UPTD Pemadam Kebakaran untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang bidang pekerjaan umum bidang cipta karya, perumahan, penataan ruang dan bidang pekerjaan umum khusus kebersihan, pertamanan dan pemakaman.

- 3.15. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang administrasi keuangan daerah khusus pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan administrasi keuangan daerah khusus pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah. Unsur pelaksana teknis pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah terdiri dari 6 (enam) UPTD Pengelola Pendapatan Daerah di 6 (enam) wilayah eks-Pembantu Bupati untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang urusan administrasi keuangan daerah khusus pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.
4. Lembaga Teknis Daerah, yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati, terdiri dari Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Lembaga Perangkat Daerah lain yang berbentuk Badan dan atau Kantor dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.
 - 4.1. Inspektorat, adalah unsur pengawas yang merupakan badan pengawasan daerah sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - 4.2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik serta di bidang penelitian dan pengembangan.

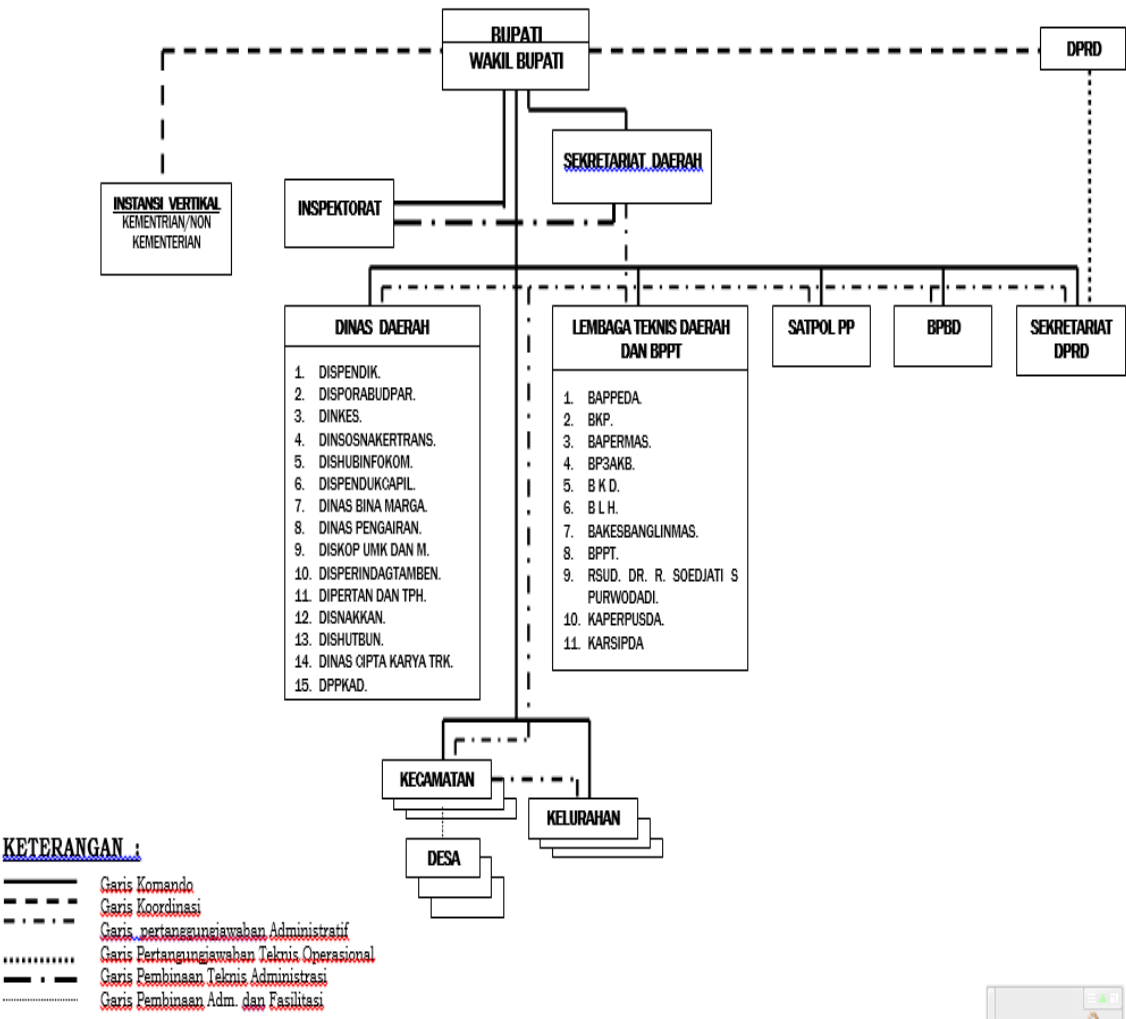


- 4.3. Badan Ketahanan Pangan, merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan. Unsur pelaksana pada Badan Ketahanan Pangan terdiri dari 3 (tiga) UPTB Lumbung Cadangan Pangan yang melaksanakan urusan dan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan.
- 4.4. Badan Pemberdayaan Masyarakat, merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat.
- 4.5. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana. Unsur pelaksana pada Badan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terdiri dari 19 (sembilan belas) UPTB Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kecamatan yang melaksanakan urusan dan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- 4.6. Badan Kepegawaian Daerah, merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- 4.7. Badan Lingkungan Hidup, merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- 4.8. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
- 4.9. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodjardjo, merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
- 4.10. Kantor Perpustakaan Daerah, merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan tugas di bidang perpustakaan daerah.
- 4.11. Kantor Arsip Daerah, merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan tugas di bidang arsip daerah.



- 4.12. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan, merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan perijinan secara terpadu dan penanaman modal.
- 4.13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, adalah perangkat daerah Kabupaten Grobogan yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
5. Kecamatan, Kecamatan di wilayah Kabupaten Grobogan berjumlah 19 (sembilan belas) yang merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan, Kelurahan di wilayah Kabupaten Grobogan berjumlah 7 (tujuh), yang merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan dalam wilayah kerja Kecamatan. Lurah adalah sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya, berkedudukan di bawah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Adapun Bagan Pola Organisasi dan Hubungan Kerja antar Perangkat Daerah/ Instansi Vertikal dan antara Kecamatan dengan Pemerintahan Desa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana Gambar I.7 sebagai berikut :



Gambar I.7
Bagan Pola Hubungan Kerja
Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan



Saat ini (akhir Desember 2016), Pemerintah Kabupaten Grobogan memiliki 9.256 orang pegawai, dengan komposisi sebagai berikut :

1. Jabatan struktural sebanyak 1.235 jabatan, yang terdiri dari :
 - a. Jabatan Eselon IIA sebanyak 1 jabatan (terisi);
 - b. Jabatan Eselon IIB sebanyak 35 jabatan (terisi 33, kosong 2);
 - c. Jabatan Eselon IIIA sebanyak 67 jabatan (terisi 63, kosong 4);
 - d. Jabatan Eselon IIIB sebanyak 116 jabatan (terisi 107, kosong 9);
 - e. Jabatan Eselon IVA sebanyak 682 jabatan (terisi 570, kosong 112);
 - f. Jabatan Eselon IVB sebanyak 272 jabatan (terisi 143, kosong 129);
 - g. Jabatan Eselon VA sebanyak 62 jabatan (terisi 45, kosong 17).
2. Pejabat Fungsional Khusus sebanyak 6.445 orang, yang terdiri dari :
 - a. Fungsional Guru sebanyak 5.208 orang
 - b. Fungsional non Guru sebanyak 1.237 orang, yang terdiri dari :

1) Apoteker	: 12 orang;
2) Asisten Apoteker	: 37 orang;
3) Auditor	: 7 orang;
4) Bidan	: 293 orang;
5) Dokter	: 58 orang;
6) Dokter Gigi	: 10 orang;
7) Fisioterapis	: 11 orang;
8) Nutrisi	: 28 orang;
9) Pamong Belajar	: 26 orang;
10) Pekerja Sosial	: 5 orang;
11) Pengantar Kerja	: 2 orang;
12) Pengawas Sekolah	: 95 orang;
13) Pengawas Pemerintahan	: 7 orang;
14) Penilik	: 34 orang;
15) Penyuluh KB	: 66 orang;
16) Penyuluh Kehutanan	: 3 orang;
17) Penyuluh Kesehatan Masyarakat	: 3 orang;
18) Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	: 1 orang;
19) Penyuluh Pertanian	: 62 orang;
20) Perawat	: 340 orang;
21) Perawat Gigi	: 34 orang;
22) Perekam Medis	: 17 orang;
23) Pranata Laboratorium	: 40 orang;
24) Radiografer	: 14 orang;
25) Sanitarian	: 27 orang;
26) Teknisi Elektromedis	: 5 orang;
 - c. Pejabat Fungsional Umum (staf) sebanyak 1.849 orang